

Sejarah Dinasti Abbasiyah: Sistik Politik, Sistik Peradilan, dan Manajemen Kepemimpinan

Syofiah Pribadi¹, Ajid Thohir², Asep Ahmad Hidayat³, Danni Nursalim⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

Corresponding Author: ✉ syofiah.pribadi76@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to delve into the historical evolution of a long-standing nation, necessitating an examination of classical historical texts authored by contemporaneous or proximate historians. The author extensively draws upon insights and data from these classic historical sources. Employing a qualitative research approach, the study adopts the four phases of historical research methodology: heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The research findings and subsequent discourse center around the Abbasid Dynasty, a prominent era of the Islamic caliphate situated in Baghdad, Iraq, spanning four centuries and encompassing both its zenith and decline after supplanting the Umayyad Dynasty. Notably, the Abbasid dynasty's legacy rests in its swift cultivation of culture, art, and science during its tenure. Conclusively, this research establishes key insights regarding the Abbasid Dynasty's characteristics: firstly, the Bani Abbas's political paradigm asserting their entitlement to the caliphate as descendants of Prophet Muhammad, a pivotal element upholding their dominion for five centuries. Secondly, the administrative structure of Abbasid governors differed from the Umawiyah Dynasty, with regional governors assuming roles primarily as military leaders and spiritual guides. Lastly, the judicial framework of the Abbasid era witnessed the waning of *ijtihad*'s vigor coinciding with the establishment of the four major *madhhabs*. Consequently, judges were bound to adhere to a specific school of thought while delivering verdicts.

Keywords: History of the Abbasid Dynasty, Political system of Bani Abbas, Governors of the Abbasid Daulah

ARTICLE INFO

Article history:

Received
March 27, 2023

Revised
July 14, 2023

Accepted
July 20, 2023

How to cite

Syofiah Pribadi. Ajid Thohir. Asep Ahmad Hidayat. Danni Nursalim., (2023). Sejarah Dinasti Abbasiyah: Sistik Politik, Sistik Peradilan, dan Manajemen kepemimpinan. *Attractive : Innovative Education Journal*, 5(2). 715-729.

Journal Homepage

<https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Published by

CV. Creative Tugu Pena

PENDAHULUAN

Sejarah kepemimpinan Islam dilihat melalui sejarah yang sangat panjang. Semenjak Nabi SAW meletakkan dasar kepemimpinan Islam yang pertama di Madinah, yang kemudian berlanjut dengan Khulafa Rasyidūn, dan berakhir ketika runtuhnya Daulah Utsmaniyah (Ottoman) di Turki tahun 1924 H. Lebih dari 1.000 tahun kekuasaan umat Islam membentang timur sampai ke barat bumi, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, memberikan warna pada kehidupan manusia, yang tidak dapat diabaikan begitu saja.

Pasca al-Khulafa al-Rashidun, ketika Dinasti Umayyah berkuasa terjadilah cara pemilihan khalifah berdasarkan sistem monarki (kerajaan). Sehingga banyak terjadi gesekan antar

umat Islam. Hal tersebut disebabkan oleh sosial politik (bentuk strukturnya) dan sosial budaya (kultur). Sehingga terjadi perubahan sistem pemerintahan dari demokrasi menjadi monarkhiheriditis (kerajaan turun temurun) (Amrullah, 2019). Bermula sejak sahabat Muawiyah bin Abu Sufyan RA melantik Yazid bin Muawiyah, yang masih di bawah umur, sistem pemerintahan Islam telah beralih dari sistem khilafah menjadi monarki atau kerajaan. Sistem inilah yang terus berlanjut dari dinasti ke dinasti lainnya, hingga ke masa Daulah Utsmaniyah di Turki. Sehingga yang bisa disebut Khilafah Islamiyah yang sebenarnya, hanya dari masa Abu Bakr al-Ṣiddīq RA, sampai masa al-Hasan bin Ali bin Abu Ṭālib RA yang kemudian menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Hanya 30 tahun, sebagaimana sabda Nabi SAW,

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمَهَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخِلَافَةُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ مُلْكٌ بَعْدَ ذَلِكَ

Dari Sa'īd bin Juhmān ia berkata, Safinah berkata kepadaku, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Khilafah dalam umatku lamanya 30 tahun, kemudian setelah itu raja-raja.”

Sehubungan dengan itu, Imam al-Suyūṭī dalam mukadimah kitab *Tārikh Khulafā'* membahas secara singkat sebuah tema: “Pasal: Masa Keberadaan Khilafah dalam Islam” (Ramdan, 2023).

Oleh karena itu, penamaan Khalifah untuk para pemimpin Islam setelah masa Muawiyah, hanya simbolis saja. Sebab kenyataannya mereka adalah para raja/sultan yang mendapatkan kekuasaan berdasarkan garis keturunan, bukan atas musyawarah para tokoh negara (*ahlu al-halli wa al-'aqdi*).

Termasuk dalam rentetan panjang sejarah kepemimpinan umat Islam, adalah Daulah Abbasiyah, yang berdiri dari tahun 132 H sampai dengan 656 H, atau dari tahun 750 M sampai dengan 1258 M (Nuril, 2021). Sebuah sejarah panjang bagi sebuah dinasti yang menguasai lebih dari 1/3 bumi. Sehingga negara ini mengalami jatuh bangun dan melewati beberapa fase, hingga kehancurannya. Fakta menunjukkan, bahwa sejarah Daulah Abbasiyah ini merupakan sejarah yang rumit dan bercabang, yang mempunyai aliran politik bermacam-macam. Di satu sisi, Daulah Abbasiyah ini merupakan perpanjangan dari Daulah Umawiyah, karena mereka membawa panji Islam dan bangsa Arab. Namun di sisi lain, orang-orang non Arab, seperti Persia dan Turki, mempunyai peranan penting di dalam politik mereka. Walaupun tetap bisa dikatakan, bahwa akidah Islam menjadi dasar setiap pergerakan mereka (Ibrahim, 2021). Berdirinya Daulah Abbasiyah ini bukan hanya sekedar dengan dibaiatnya satu khalifah menggantikan khalifah yang lain, atau pindahnya kekuasaan dari Bani Umayyah ke Bani Abbas. Berdirinya Daulah Abbasiyah ini bisa dikatakan sebagai revolusi menyeluruh dalam sejarah Islam, yang memberikan warna baru dalam perkembangan umat Islam. Keberadaannya mengubah masyarakat Islam secara radikal, dan memberikan bekas mendalam dalam semua aspek kehidupan, baik itu politik, sosial, budaya dan ekonomi. Daulah ini memberikan kesempatan kepada orang-orang non Arab untuk muncul di semua bidang tersebut (Aprianty, 2022).

Para ahli sejarah mencoba untuk mencari tahu rahasia di balik berdirinya Daulah Abbasiyah. Ada yang berpendapat, ini merupakan pembalasan bangsa Persia kepada bangsa Arab (mukaromah, 2018). Ada yang mengatakan bahwa ini hanya pemberontakan terhadap Daulah Umawiyah yang digantikan oleh Bani Abbas. Sebagian lain mengatakan, bahwa berdirinya Daulah Umawiyah karena perkembangan yang terjadi di dunia Islam pada abad pertama hijriah. Jika ditilik lebih jauh, keberhasilan Bani Abbas menjatuhkan Daulah Umawiyah, karena sikap Bani Umayyah yang tidak seimbang dalam memperlakukan bangsa non Arab, dan memperlakukan sebagian bangsa Arab lainnya. Ini merupakan masalah besar dalam politik negara. Fenomena itu dimanfaatkan Bani Abbas untuk memperjuangkan kepentingan mereka (Hasanah & Verawati, 2022). Selain mereka juga memanfaatkan kekosongan kepemimpinan dalam gerakan Ahlul Bait, sepeninggal Abu Hāshim bin Muhammad bin al-Hanafiyah. Mereka menyerukan dakwah “Mencari Keridhaan Ahlul Bait Muhammad”, untuk menarik dukungan umat Islam. Namun pada dasarnya, adalah memperjuangkan Bani Abbas untuk menggulingkan Daulah Umawiyah. Pada saat yang sama, bangsa Arab saling berselisih di Khurasan dan tidak berkesudahan. Di saat yang sama pula, posisi geografis mereka menyebabkan mereka bertempur melawan Turki yang ateis. Ditambah dengan adanya orang-orang Persia dan kaum budak yang kecewa dengan kebijakan

Bani Umayyah. Apalagi Khurasan letaknya jauh dari pusat pemerintahan Islam di Damaskus. Semuanya ini menjadi faktor pendukung terciptanya chaos di daerah tersebut, yang dimanfaatkan dengan baik oleh Bani Abbas (Salsabila & Sunan, 2021).

Pada akhirnya Abu al-Abbas al-Saffāh, yang menggantikan abangnya, berhasil memunculkan seruan Bani Abbas untuk merebut kekuasaan. Ia berpidato di hadapan manusia dan mengumumkan berdirinya Khilafah Abbasiyah, sehingga ia dicatat sebagai Khalifah Abbasiyah yang pertama. Ia kemudian menghabiskan sisa-sisa Bani Umayyah yang tersisa, namun sebagian sempat melarikan diri ke Eropa, dan mendirikan kekuasaan di sana. Kemudian ia diganti oleh Abu Ja'far al-Manṣūr, yang merupakan pendiri Daulah Abbasiyah yang sebenarnya (Subhani et al., 2023).

Abu al-Abbas al-Saffāh meninggal tahun 754 M. dan digantikan oleh saudaranya, Abu Ja'far al-Manṣūr dari tahun 754-774 M (Rusydi, 2023). Dialah sebenarnya yang dianggap sebagai pendiri Dinasti Abbasiyah. Dia tetap melanjutkan kebijakan al-Saffāh yakni menindak tegas setiap orang yang menentang kekuasaannya, termasuk juga dari kalangan keluarganya sendiri (Rizal, Saputri, & Imanda, 2023). Batasan kekuasaan umat Islam ketika Bani Abbas merebut kekuasaan dari Bani Umayyah adalah mencapai daerah Jurjan (Gorgan, Iran), berbatasan dengan Turki dan Cina, sampai ke tenggara Kashmir, lalu di Nubah di Selatan Mesir, sampai ke Maroko. Kemudian di Kaukasus dan utara Armenia, yang berbatasan dengan Imperium Bizantium (Muid, 2019).

Pada awal berdirinya, Daulah Abbasiyah mengalami berbagai macam gesekan dalam negeri, untuk merebut kekuasaan, yang berkembang menjadi pertumpahan darah. Bisa dikatakan, bahwa perseteruan antara Al-Amin dan Al-Ma'mun, adalah perselisihan paling berbahaya. Selain itu, Daulah Abbasiyah juga menghadapi kekecewaan dari keturunan paman mereka, Bani Tālib. Mereka berharap mendapatkan kekuasaan ketika mendukung gerakan Bani Abbas. Selain itu juga Bani Abbas menghadapi gerakan separatis Persia yang memusuhi bangsa Arab. Mereka juga berbenturan dengan Imperium Bizantium di daerah perbatasan, sehingga terjadi pertempuran antara dua negara besar. Walaupun Daulah Abbasiyah fase pertama menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan, serta peperangan, internal dan eksternal, namun itu semua tidak menghalangi mereka untuk meningkatkan kemajuan mereka di semua bidang. Hal itu dimulai dengan pembangunan kota Baghdad pada masa al-Manṣūr, dan menjadi ibu kota Khilafah Abbasiyah. Kota Baghdad termasuk salah satu pusat peradaban Islam dan pusat perniagaan yang berkembang. Kemudian al-Mu'tasim mendirikan kota Samara dan tinggal di sana, kemudian menjadikannya pangkalan negara tanpa mengurangi fungsi dari kota Baghdad.

Daulah Abbasiyah kehilangan efektivitasnya pada fase kedua, yang dimulai pada tahun 232 H/847 M. Hal itu disebabkan lemahnya pemerintahan, yang menyebabkan lemahnya kekuasaan pusat negara secara politik, manajemen dan finansial. Sehingga daerah-daerah mulai bergerak memisahkan diri dari pusat. Terjadilah desentralisasi kekuasaan. Bangsa-bangsa yang baru bergabung dalam masyarakat Islam berhasil memasuki lingkaran kekuasaan, dan para khalifah berada di bawah pengaruh mereka, sehingga peran politik para khalifah semakin mengerdil. Lalu muncullah bangsa Turki dalam bidang politik, mereka menjadi back up manajemen negara di belakang layar v("Tata Kelola Pemerintahan Dalam Islam Sejarah Kepemimpinan Khalifah Hārūn Al ... - Ibnu Rusydi - Google Buku," n.d.).

Arah politik Daulah Abbasiyah berubah. Fanatisme kesukuan di tengah-tengah seruan egaliter, semakin menonjol. Negara kemudian memenuhi tuntutan daerah, sehingga semakin menegaskan desentralisasi. Pada saat ini, yang terlihat adalah upaya masing-masing daerah untuk memajukan daerahnya masing-masing, jauh dari campur tangan pemerintahan pusat. Maka hilanglah pada masa ini ide untuk menggabungkan Dunia Islam di bawah satu kepemimpinan politik. Hubungan antara pusat pemerintahan dengan pemerintahan daerah, berubah-ubah antara permusuhan yang nyata dan kerja sama yang menghasilkan.

Akibat lemahnya khalifah pusat, sedikit banyak telah menggoda sejumlah penguasa daerah (gubernur) untuk melirik pada otonomisasi. Para gubernur (*amir*) yang berdomisili di wilayah Barat Baghdad seperti Aghlabiyah, Idrisiyah, Fatimiyah, Amawiyah II, Thulunyah, Hamdaniyah maupun yang berdomisili di Timur Baghdad seperti Thahiriyah, Shafariyah,

Ghazawiyah, Samaniyah, mencoba untuk tidak taat lagi pada khalifah pusat di Baghdad (Salsabila et al., 2021). Demikianlah Daulah Abbasiyah berlangsung selama ratusan tahun, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, sebelum semakin meredup lalu menghadapi kehancurannya. Jika kita *merujuk* buku-buku sejarah Islam klasik, kita akan dapati betapa detailnya sejarah diceritakan, dari berbagai sudut pandang. Sehingga kalau dikumpulkan, akan menghasilkan sebuah tulisan yang cukup panjang.

Dalam artikel sederhana ini, penulis mencoba untuk mengulas sejarah singkat Daulah Abbasiyah dan pengaruhnya dalam kemajuan umat Islam. Untuk itulah, penulis mengambil judul: Daulah Abbasiyah: Berdiri dan Runtuhnya. Tentu saja penulis mencoba untuk menampilkan faktor-faktor paling menonjol Daulah Abbasiyah, yang membedakan dengan daulah-daulah lainnya, dengan secara singkat. Dengan harapan, artikel ini akan memberikan sumbangsih pemikiran dalam khazanah sejarah peradaban Islam. Tidak dipungkiri lagi, bahwa tujuan dari mempelajari kejadian-kejadian sejarah adalah untuk mengambil pelajaran dan mengambil faedah darinya. Oleh karena itu, penelitian sederhana ini mencoba untuk mengambil data dari sumber-sumber primer yang berbeda-beda, yang bisa didapatkan oleh penulis. Hal itu bisa dilihat dari catatan kaki yang ditampilkan oleh penulis. Dalam penelitian ini, tujuan utama penulis adalah untuk mencapai beberapa hal penting terkait dengan Daulah Abbasiyah. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk memahami sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah, yang merupakan periode penting dalam perkembangan peradaban Islam. Kedua, penelitian ini juga bertujuan untuk menggali dan menganalisis situasi yang terjadi selama fase pertama Daulah Abbasiyah, termasuk peristiwa-peristiwa signifikan dan dinamika politik pada masa tersebut. Selanjutnya, penulis juga bermaksud untuk menjelaskan secara rinci situasi yang muncul selama fase kedua Daulah Abbasiyah, yang mungkin memiliki perbedaan dan kontinuitas dengan periode sebelumnya. Terakhir, penelitian ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi umum Daulah Abbasiyah, mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik, yang secara keseluruhan akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang masa tersebut.

METODE

Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yang meliputi empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi (Sayono, 2021). Penelitian yang dipilih oleh penulis dalam penulisan artikelnya adalah metode kualitatif. Sebab dalam metode kualitatif itu adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang sering juga disebut sebagai paradigma interpretif dan konstruktif, yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik/menyeluruh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif. Pendekatan penelitian ini juga disebut dengan pendekatan naturalistik. Karena penelitiannya dilakukan pada obyek alamiah yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti. Kehadiran peneliti sama sekali tidak berpengaruh kepada dinamika yang ada. Pendekatan ini memandang bahwa kenyataan sebagai sesuatu yang berdimensi jamak, utuh dan merupakan satu kesatuan. Berdasarkan metodologi penelitian yang dipilih, penulis melakukan telaah pustaka (Library Research), di mana peneliti berusaha untuk menggali data dan fakta sebagai satu kesatuan utuh. Setelah itu, peneliti berusaha untuk mengambil poin-poin penting dari data dan fakta tersebut secara objektif, tanpa mengikut sertakan pendapat pribadi penulis yang tidak berhubungan dengan data dan fakta yang ada (Walliman, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Berdirinya Daulah Abbasiyah

Masa Khilafah Marwan bin Muhammad (127 H-132 H) adalah masa terakhir Daulah Umawiyah. Pada masanya, Daulah Umawiyah mulai jatuh dan hancur, yang memuluskan jalan berdirinya Daulah Abbasiyah. Pada masa itu, terjadi pemberontakan terhadap pemerintahan Umawiyah di semua pelosok Syam, dan terjadi kekacauan di Irak. Kekacauan di Irak disebabkan lebih banyak oleh pemberontakan kaum Khawarij, yang menjadi duri dalam daging bagi umat Islam sepanjang zaman.

Ketika Marwan belum selesai menghadapi pemberontakan Khawarij, tiba-tiba muncul kabar akan berdirinya Daulah Abbasiyah di Khurasan. Dalam konteks penelitian ini, beberapa faktor penting memengaruhi situasi Daulah Abbasiyah pada masa tersebut. Pertama-tama, terdapat ketidakpastian politik yang melanda daerah Irak dan Syam, menciptakan lingkungan yang tidak stabil bagi pemerintahan. Di samping itu, perpecahan di antara kabilah-kabilah Arab di Yaman, yang tercermin dalam fanatisme suku, turut mempengaruhi dinamika politik pada periode tersebut. Selain itu, perpecahan yang meruncing di tengah-tengah keluarga penguasa Daulah Abbasiyah juga menjadi salah satu aspek signifikan. Persaingan yang memuncak dalam usaha berebut kekuasaan antara anggota keluarga penguasa menciptakan ketidakstabilan internal yang mempengaruhi kemampuan negara dalam menjalankan pemerintahannya. Penting untuk dicatat bahwa dalam situasi seperti ini, paradigma keturunan juga memiliki dampak besar. Orang-orang dengan perilaku yang tidak menguntungkan dan berperangai buruk mendapatkan posisi kekuasaan tertinggi berdasarkan garis keturunan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa faktor non-kompetensi dapat berperan penting dalam penentuan siapa yang akan memimpin, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi stabilitas dan efektivitas pemerintahan. Ketiga faktor ini secara bersama-sama membentuk latar belakang yang kompleks bagi Daulah Abbasiyah pada periode tersebut, dan penelitian lebih lanjut dapat mengungkapkan kaitan antara faktor-faktor ini dan dinamika sosial, politik, dan budaya pada masa lampau.

Semua hal tersebut menyebabkan fondasi Daulah Umawiyah menjadi rapuh. Ditambah dengan adanya perseteruan besar di antara umat Islam saat itu, yaitu antara bangsa Arab dengan bangsa non Arab. Hal itu disebabkan politik Bani Umayyah yang sangat mengistimewakan bangsa Arab dan menganaktirikan bangsa lainnya. Tentu saja hal ini menyebabkan kecemburuan sosial, yang semakin lama semakin memuncak. Sosok Abu Muslim al-Khurasany muncul di tengah-tengah kesemrawutan Daulah Umawiyah pada tahun 129 H. Setelah ia mendapatkan kepercayaan dari Sulaiman bin Katsir, ia bergerak melancarkan kampanye meminta dukungan untuk Bani Abbas. Dengan kecerdikannya, ia berhasil mendapatkan dukungan dan kepercayaan bangsa-bangsa non Arab (mawali), yang sudah sejak lama memendam kekecewaan terhadap Daulah Umawiyah. Kemudian ia menuju ke Yaman, dan mendapatkan dukungan dari penduduk Taqadum yang sangat menentang Daulah Umawiyah.

Seruan agar terjadi perpindahan kekuasaan dari Bani Umayyah ke Bani Abbas, awalnya dimulai secara rahasia. Ketika sebuah surat yang memerintahkan Abu Muslim al-Khurasany mengawasi dengan ketat siapa saja yang berbicara bahasa Arab, jatuh ke tangan Marwan bin Muhammad, pada saat itu terkuaklah gerakan rahasia dari Bani Abbas untuk merebut kekuasaan. Kejadian itu menyebabkan Ibrahim al-Imam dikebloskan ke dalam penjara, dan kemudian mati dibunuh dengan racun. Namun gerakan Bani Abbas sudah tidak terbendung lagi. Sepeninggal Ibrahim al-Imam, komando diambil alih oleh Abu Salamah al-Khalal yang menjadikan Kufah sebagai

pusat komando, karena daerah ini merupakan pusat aliran Syiah saat itu. Abu Salamah dikenal sebagai Menteri Keluarga Muhammad. Bani Hasyim yang masih keturunan Bani Abbas, yang dipimpin oleh Abu Ja'far kemudian bergerak menuju Kufah, untuk bergabung dengan Bani Abbas.

Pada saat itu timbul kecurigaan dari Bani Abbas, bahwa Abu Salamah akan memindahkan tampuk pimpinan kudeta, dari Bani Abbas ke Bani Ali (Alawiyin). Diduga karena ia tidak mendapatkan kabar, bahwa sebelum Ibrahim al-Imam dibunuh, ia telah menunjuk Abu al-Abbas sebagai penggantinya. Dugaan lain, karena Abu Salamah menganggap Abu al-Abbas kurang layak menjadi pemimpin revolusi Bani Abbas. Pada akhirnya, penduduk Khurasan berhasil memaksakan calon pemimpin mereka untuk memimpin Bani Abbas, yaitu Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad. Maka dibaiat sebagai Khalifah pada hari Jumat 12 Rabiul Akhir 132 H. Namun perlu diperhatikan, sejarah mencatat, bahwa kekuasaannya dimulai sejak terbunuhnya Marwan bin Muhammad, khalifah Bani Umayyah yang terakhir, yaitu pada tanggal 3 Dzulhijjah 132 H. Kenapa? Karena selama khalifah yang lama masih ada, maka khalifah yang baru tidak akan diakui.

Dengan terbunuhnya Marwan bin Muhammad, maka berakhirilah kekuasaan Bani Umayyah. Di atas puing-puing mereka, berdirilah Bani Abbas yang memulai babak baru dalam sejarah Islam dengan berdirinya Daulah Abbasiyah. Kekuasaan mereka berlangsung selama lima abad, dan melewati lima fase. Masing-masing fase mempunyai ciri khas masing-masing yang akan menjadi pembahasan selanjutnya. Berdirinya Daulah Abbasiyah ini bukan hanya sekedar dengan dibaiatnya satu khalifah menggantikan khalifah yang lain, atau pindahnya kekuasaan dari Bani Umayyah ke Bani Abbas. Berdirinya Daulah Abbasiyah ini bisa dikatakan sebagai revolusi menyeluruh dalam sejarah Islam, yang memberikan warna baru dalam perkembangan umat Islam. Keberadaannya mengubah masyarakat Islam secara radikal, dan memberikan bekas mendalam dalam semua aspek kehidupan, baik itu politik, sosial, budaya dan ekonomi. Daulah ini memberikan kesempatan kepada orang-orang non Arab untuk muncul di semua bidang itu.

Fase Pertama Daulah Abbasiyah

Sejak awal berdirinya, Daulah Abbasiyah mengalihkan pusat kekuasaannya ke Khurasan. Hal itu karena pendukung mereka banyak berasal dari Khurasan, di samping untuk menghindari penduduk Syam yang masih mendukung Bani Umayyah. Dalam konteks sosiologi politik Daulah Abbasiyah, sejumlah faktor signifikan secara berdampak pada pola politik pada masa itu. Salah satu faktor utama adalah pergeseran pusat kekuasaan dari Syam ke Irak. Hal ini tidak hanya mengubah dinamika politik, melainkan juga membawa perubahan budaya yang terkait. Perpindahan ini secara tidak langsung mengalihkan pengaruh budaya Romawi yang ada di wilayah Syam ke budaya Persia yang lebih kuat di Irak, membentuk kerangka budaya yang baru. Pengaruh Persia juga terbukti krusial, baik dalam struktur pemerintahan maupun gaya hidup keluarga penguasa Bani Abbas. Faktor lain yang memainkan peran adalah peningkatan perdagangan di timur, yang memberikan dampak ekonomi serta mengubah dinamika sosial dan politik di wilayah tersebut. Seiring dengan perubahan geopolitik, perhatian Daulah Abbasiyah bergeser dari wilayah Laut Mediterania karena pusat kekuasaan mereka yang jauh dari pantai. Namun, keputusan ini juga memengaruhi kemampuan mereka dalam mengelola interaksi dengan dunia Romawi yang sebelumnya erat. Terakhir, fokus yang terbatas pada angkatan laut, atau kekurangan perhatian terhadapnya, disebabkan oleh posisi geografis yang jauh dari pantai. Semua faktor ini,

dalam gabungan, membentuk kerangka sosial dan politik yang kompleks di masa Daulah Abbasiyah.

Pada masa Daulah Abbasiyah, negara Islam tidak lagi disibukkan dengan peperangan. Gerakan penaklukan dan penyebaran Islam di daratan-daratan asing sudah terhenti. Secara umum, Bani Abbas mengalihkan mereka ke daerah timur. Mereka menganggap laut itu sebagai batasan negara mereka yang wajib dijaga, bukan sebagai gerbang untuk memperluas negara mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Umayyah ke Andalusia. Mereka kemudian menghentikan bahaya yang dari Cina dari arah Turkistan, yang berakhir adanya hubungan yang erat antara kedua negara, terutama dalam bidang perdagangan. Adapun di laut, yang pada masa Daulah Umawiyah merupakan pangkalan militer, berubah menjadi pusat perdagangan. Dengan demikian, rombongan dagang dari India bebas masuk ke pasar Irak dengan tenang. Perjanjian damai antara Daulah Abbasiyah dengan Cina telah membuka pasar di Timur Jauh. Kemudian perjanjian dengan Eropa membuat gerakan perdagangan Daulah Abbasiyah mencapai ke sebelah barat Eropa.

Fase pertama Daulah Abbasiyah bisa dikatakan sebagai satu kesatuan kekuasaan yang berkesinambungan. Hal itu, karena semua pemimpin atau khalifah di Daulah Abbasiyah tidak mempunyai politik pribadi. Mereka semua berjalan di atas politik bersama. Semua kejadian-kejadian besar yang terjadi pada masa itu, berjalan dalam gelombang umum, seperti menjatuhkan bangsa Arab dan mendahulukan bangsa Persia. Lalu mendahulukan bangsa Turki di atas bangsa Arab dan Persia. Pada masa ini juga muncullah kebangkitan di bidang ilmu dan sastra, yang diiringi kebangkitan kebebasan berpikir dalam penelitian, diskusi dan perdebatan. Hal itu menjadikan Daulah Abbasiyah pada fase ini sebagai simbol kemajuan peradaban Islam. Semua ini karena para khalifah Daulah Abbasiyah fase pertama ini merupakan orang-orang yang visioner, mulai dari Abu al-Abbas al-Saffah, sampai al-Watsiq. Kecuali Al-Amin, yang tidak bisa mengimbangi kebesaran para khalifah lainnya di bidang politik.

Adapun khalifah-khalifah Daulah Abbasiyah fase pertama adalah;

1. Abu al-Abbas al-Saffah 132-136 H.
2. Abu Ja'far al-Manshur 136-157H.
3. Muhammad al-Mahdy 158-169 H.
4. Musa al-Hady 169-170 H.
5. Harun al-Rasyid 170-193 H.
6. Muhammad al-Amin 193-198 H.
7. Abdullah al-Ma'mun 198-218 H.
8. Muhammad al-Mu'tashim 218-227 H.
9. Harun al-Watsiq 227-232 H.
10. Al-Mutawakkil 232-247 H.

Fase Kedua Daulah Abbasiyah

Fase Kedua Daulah Abbasiyah di Baghdad, yang berlangsung selama empat abad, termasuk masa kelemahan dan kemunduran Bani Abbas. Para khalifah pada masa itu menjadi boneka bangsa Turki, Bani Bawayh, kemudian Bani Saljuk. Keberadaan mereka di tahta kekuasaan, tergantung kepada kekuasaan yang menggerakkan mereka, baik itu Bani Bawayh, bangsa Turki, maupun Bani Saljuk. Hal itu menjadikan seringnya terjadi pergantian dalam pemerintahan. Selain itu, sogok menyogok untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi menjadi hal yang lumrah. Kebobrokan ini telah meliputi semua sendi kehidupan Daulah Abbasiyah.

Dari sisi pemerintahan, terjadi perubahan menjadi desentralisasi. Banyak daerah-daerah yang jauh dari Baghdad kemudian memisahkan diri dari Daulah Abbasiyah. Mereka kemudian menjadi negara independen atau otonomi, dengan tetap mengakui Daulah Abbasiyah sebagai pengayom mereka. Bentuk-bentuk pengakuan yang dilakukan terhadap Daulah Abbasiyah adalah bermacam-macam dan mencerminkan hubungan politik serta simbolisme dalam masyarakat. Pertama,

masyarakat menunjukkan penghormatan terhadap khalifah dengan mendoakan kebaikannya di mimbar-mimbar masjid, menjadikan doa sebagai ekspresi dukungan dan ketaatan terhadap pemerintahan pusat. Selanjutnya, tanda-tanda pengakuan juga terlihat dalam mata uang yang dicetak, di mana nama khalifah dicantumkan di atas nama sultan setempat, menggarisbawahi kewibawaan dan kedudukan pemerintah pusat. Selain itu, dukungan finansial juga menjadi bentuk pengakuan yang diwujudkan dalam pengiriman sebagian upeti atau kharaj yang diperoleh oleh penguasa setempat ke Baitul Mal di Baghdad, pusat keuangan Daulah Abbasiyah. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan pengakuan atas otoritas fiskal pusat, tetapi juga menjadi wujud konkret dari ketergantungan finansial terhadap pusat kekuasaan.

Secara keseluruhan, bentuk-bentuk pengakuan ini menegaskan peran sentral Daulah Abbasiyah dalam urusan politik, ekonomi, dan simbolis, serta menggarisbawahi dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan wilayah-wilayah yang dikuasai secara lokal. Luasnya daerah kekuasaan Daulah Abbasiyah, yang merupakan warisan dari Daulah Umawiyah, menyebabkan kesulitan untuk mengontrolnya secara langsung dari pusat pemerintahan di Baghdad. Hal itu karena sarana prasarana untuk berkomunikasi dan sarana transportasi belum memadai. Sehingga untuk menyampaikan kabar dari satu tempat ke tempat lain, bisa memakan waktu sehari-hari, bahkan berminggu-minggu. Itu cukup membuat koordinasi semakin sulit.

Menghadapi situasi ini, Daulah Abbasiyah menggunakan sistem pembagian kekuasaan untuk mempermudah kontrol wilayah. Sebagai contohnya, Khalifah Harun al-Rasyid membagi kekuasaan di antara kedua anaknya, Al-Amin yang menguasai daerah barat, dengan Al-Ma'mun yang menguasai daerah timur. Para khalifah selanjutnya kemudian mengikuti apa yang dilakukan Harun al-Rasyid. Hasil dari pembagian kekuasaan ini berbanding terbalik dengan tujuan asalnya. Pembagian kekuasaan dilakukan bertujuan adanya pemusatan kekuasaan dan menyatukan daerah-daerah yang terpisah jauh secara jarak. Akan tetapi fenomena yang ada, menyebabkan adanya upaya melepaskan diri dari kekuasaan pusat, dengan memanfaatkan situasi sosial dan ekonomi yang sedang menurun. Hasilnya bisa ditebak, upaya memisahkan diri berhasil untuk memuluskan jalan berdirinya negara-negara kecil yang berdaulat penuh.

Hal itu ditambah dengan upaya dari bangsa-bangsa non Arab, yang berupaya untuk mendapatkan hak-haknya yang penuh, sesuai syariat Islam, yang selama ini tidak mereka dapatkan dari Daulah Umawiyah. Daulah Abbasiyah berusaha untuk memenuhi tuntutan mereka ini, karena mereka berjasa di dalam berdirinya negara ini. Hal itu menyebabkan fanatisme kebangsaan dan kesukuan di antara bangsa-bangsa non Arab semakin mengental. Semua itu mendorong berdirinya negara-negara pecahan yang berdasarkan kesukuan. Ketika pengaruh bangsa Turki semakin mencengkeram Daulah Abbasiyah, negara menjadikan sebagian panglima Turki sebagai gubernur wilayah yang jauh, dengan melalaikan pengawasan terhadap mereka. Para gubernur ini pun akhirnya menunjuk para pegawai di daerah mereka dari golongan mereka sendiri, untuk melanggengkan kekuasaan. Para pegawai ini kemudian berusaha untuk mengumpulkan harta dalam mencari keredaan gubernur, khalifah dan juga untuk diri sendiri. Hal itu dilakukan dengan memperbanyak pajak sehingga menzalimi rakyat.

Dalam periode II, kekuasaan politik Abbasiyah mulai menurun. Wilayah-wilayah kekuasaan Abbasiyah secara politikus sudah mulai cerai-berai. Ikatan mulai putus satu persatu antara wilayah-wilayah Islam. Pemberontakan al-Zanju pada tahun 255 H merupakan fase penentu bagi Daulah Abbasiyah. Pada saat itu pasukan yang ingin memisahkan diri sangat kuat, sehingga meretakkan kekuatan Daulah Abbasiyah.

Sudah sejak lama daerah Afrika Utara sudah melepaskan diri dari Daulah Abbasiyah. Setelah itu, banyak daerah-daerah kecil yang melepaskan diri dari Daulah Abbasiyah. Situasi sulit yang dihadapi khalifah, dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh yang tendensius untuk mendirikan pemerintahan independen di berbagai penjuru Daulah Abbasiyah. Dukungan terhadap negara-negara independen ini banyak didapatkan dari mereka yang kesulitan mencari nafkah, karena lapangan pekerjaan yang tidak memadai.

Daulah Abbasiyah telah gagal untuk menyatukan Islam di bawah satu pemerintahan Islami. Fanatisme kesukuan yang semakin lama semakin memuncak, mendorong munculnya negara-negara yang melepaskan diri dari Daulah Abbasiyah. Namun Daulah Abbasiyah yang tetap dilihat sebagai Khilafah Islam, dianggap sebagai sistem dasar bagi keberadaan umat Islam, sehingga eksistensi khilafah harus tetap terjaga, untuk mewujudkan persatuan umat Islam secara umum. Khilafah dijadikan simbol pemersatu bagi daerah-daerah Islam yang terpecah di berbagai pelosok dunia. Bahkan negara-negara yang sudah melepaskan diri secara politis, mereka tidak berpikir untuk melepaskan diri secara ikatan agama dari khilafah saat itu.

Adapun nama-nama Khalifah Daulah Abbasiyah fase kedua adalah:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Al-Mutawakkil 232-247. | 2. Al-Muntasir 247-248. |
| 3. Al-Musta'in 248-252. | 4. Al-Mu'tazz 252-255. |
| 5. Al-Muhtadi 255-256. | 6. Al-Mu'tamid 256-279. |
| 7. Al-Mu'tadid 279-289. | 8. Al-Muktafi 289-295. |
| 9. Al-Muqtadir 295-320. | 10. Al-Qahir 320-322. |
| 11. Al-Radi 322-329. | 12. Al-Muttaqi 329-333. |
| 13. Al-Mustakfi 333-334. | 14. Al-Muti' 334-363. |
| 15. Al-Ta'i' 363-381. | 16. Al-Qadir 381-422. |
| 17. Al-Qa'im 422-467. | 18. Al-Muqtadi 467-487. |
| 19. Al-Mustazhir 487-512. | 20. Al-Mustashid 512-529. |
| 21. Al-Rashid 529-530. | 22. Al-Muqtafi 530-555. |
| 23. Al-Mustanjid 555-566. | 24. Al-Mustadi' 566-575. |
| 25. Al-Nasir 575-622. | 26. Al-Zahir 622-623. |
| 27. Al-Mustansir 623-640. | 28. Al-Musta'sim 640-656. |

Daulah Abbasiyah berakhir dengan terbunuhnya Khalifah al-Mu'tasim di tangan Hulako Khan, bangsa Mongol, yang telah berhasil menghancurkan kota Baghdad, dan membantai penduduknya tanpa belas kasihan. Pada fase kedua inilah mulai terjadinya keruntuhan dan kelemahan kekuasaan Dinasti Abbasiyah. Bisa disimpulkan bahwa kemunduran Dinasti Abbasiyah disebabkan oleh dua faktor, yaitu karena faktor Internal dan Eksternal.

Kemajuan-Kemajuan Peradaban Islam Pada Dinasti Abbasiyah.

Umat Islam sesungguhnya banyak dipacu untuk dapat mengembangkan dan memberikan motivasi, melakukan inovasi, serta kreativitas dalam upaya membawa umat kepada keutuhan dan kesempurnaan hidup. Dari perjalanan dan rentang sejarah, ternyata Bani Abbas dalam sejarah lebih banyak berbuat ketimbang Bani Umayyah.

Kondisi Politik.

Langkah-langkah lain yang diambil dalam program politiknya pada masa pemerintahan Abbasiyah I adalah: Para Khalifah tetap dari Arab, sementara para Menteri, Gubernur, Panglima dan Pegawai lainnya banyak diangkat dari golongan Mawali. Kota Baghdad ditetapkan sebagai ibukota negara dan menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi dan kebudayaan kebebasan berfikir dan berpendapat mendapat porsi yang tinggi. Pada masa pemerintahan Abbasiyah II, kekuasaan politik mulai menurun

dan terus menurun, terutama kekuasaan politik pusat. Karena negara-negara bagian sudah tidak begitu memperdulikan lagi pemerintahan pusat, kecuali pengakuan secara politisi saja.

Ilmu Pengetahuan, Sains dan Teknologi.

Dinasti Abbasiyah juga dikenal karena kontribusi dalam ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang matematika, astronomi, dan kedokteran. Banyak karya-karya besar dari para ilmuwan Muslim terbit selama pemerintahan Dinasti Abbasiyah. Diantaranya kitab *Tārīkh Al-Khulafā* karya Imam Al-Hāfidzh Jalāluddin Al-Suyūty.

Sebagaimana sudah diketahui puncak perkembangan kebudayaan dan pemikiran Islam terjadi pada masa pemerintahan Bani Abbas. Akan tetapi, tidak seluruhnya berawal dari kreativitas penguasa Bani Abbas sendiri. Sebagian diantaranya sudah dimulai sejak awal kebangkitan Islam, lembaga pendidikan sudah berkembang pada masa itu, kemudian ketika pemerintahan Bani Abbas lembaga-lembaga pendidikan kembali lagi berkembang, dengan berdirinya perpustakaan dari akademi, selain perpustakaan gambaran tentang budaya baca pada periode ini bisa juga dilihat dari banyaknya toko buku, yang berfungsi sebagai agen pendidikan. Dinasti Abbasiyah mengawali puncak kejayaan pada masa pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Semasa ia memerintah, ilmu pengetahuan di kota Bagdad berkembang pesat.

Kemajuan Ilmu: Perkembangan Ilmu di dunia Islam (filsafat, astronomi, fisika, kimia, kedokteran, teknologi, dan sebagainya). Upaya Khalifah Harun Ar-Rasyid dalam pengembangan ilmu pengetahuan tersebut diantaranya memerintahkan para penerjemah buku-buku ilmiah dari bahasa Arab. Salah satunya Yuhana Ibn Masawaih (W. 857 M) seorang dokter istana yang diperintahkannya untuk menerjemahkan buku-buku kuno mengenai kedokteran. Dinasti Abbasiyah juga dikenal karena kontribusi dalam ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang matematika, astronomi, dan kedokteran. Banyak karya-karya besar dari para ilmuwan Muslim terbit selama pemerintahan Dinasti Abbasiyah.

Bahasa dan Sastra.

Satu hal yang menarik perhatian peneliti sejarah kebudayaan Islam bahwa mayoritas orang-orang fokus pada keilmuan adalah kaum Mawali, terutama orang-orang Persia. Bahasa adalah satu-satunya media komunikasi untuk berinteraksi dengan satu-satunya media komunikasi untuk berinteraksi dengan sesama kaum Muslimin sampai kekhalifahan Abbasi dan Baghdad pada abad tujuh Hijriyah lenyap di tangan orang-orang Mongol.

Tokoh yang terkenal dalam bidang ini adalah Muhammad Ibn al-Hasan al-Zubaydi (928-989 M) dan Ali Ibn Hazm (994-1064 M). Al-Zubaydi pada masa al-Hakam diangkat menjadi pengawas pendidikan anak laki-lakinya Hisyam yang pada akhirnya di angkat menjadi Qadhi dan ketua Pengadilan di Seville. Karya utamanya adalah daftar klasifikasi ahli tata bahasa dan ahli filologi yang bermunculan sepanjang hidupnya. Sedangkan Ibn Hazm merupakan pujangga besar dan yang mempunyai pemikiran murni. Menurut Ibn Khalikhan dan al-Qifthi, Ibn Hazm memiliki karya tak kurang dari 4 ratus jilid buku yang berisi tentang sejarah, teologi, hadis, logika dan puisi. Salah satu bukunya adalah "*Thauq al-Hamamah*" (kalung merpati) sebuah antologi syair-syair cinta yang memuja konsep cinta Platonis. Selain itu, pada saat Islam berkuasa bahasa Arab menjadi bahasa administrasi pemerintahan. Keadaan yang demikian itu dapat di terima oleh golongan Muslim maupun non Muslim, bahkan penduduk asli Spanyol meniadakan bahasa asli mereka.

Bidang Agama.

Pada masa Dinasti Abbasiyah pulalah, ilmu-ilmu dan metode-metode tafsir mulai berkembang dengan pesat, terutama dua metode penafsiran, yaitu Tafsir Al-Ma'tsur dan Tafsir bi Al-Ra'yi.

"Dalam bidang hadis, zamannya hanya bersifat penyempurnaan, pembukuan dan catatan dan hafalan para sahabat. Pada zaman ini juga mulai diklasifikasikan secara sistematis dan kronologis. Pengklasifikasian secara ketat, sehingga kita kenal hadis Shahih, Dhaif dan Maudhu'. Bahkan dikemukakan juga kritik sanad dan matan, sehingga terlihat jarrah wa takdil rawi yang meriwayatkan hadis tersebut". Kemudian lahir pula para ahli "dalam bidang fiqh, seperti Imam Syafii, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ibnu Hambal. Untuk urusan memutuskan hukum peradilan maka mengikuti masing-masing mazhab", (Ajid Thohir, 2001: 51).

Sistem Ekonomi.

Perkembangan Ekonomi di zaman Abbasiyah, ekonomi imperium Abbasiyah digerakkan oleh perdagangan. Sudah terdapat berbagai macam industri seperti kain linen di Mesir, sutra dari Syiria dan Irak, kertas dari Samarkand, serta berbagai produk pertanian seperti gandum dari Mesir dan kurma dari Iraq. Hasil-hasil industri dan pertanian ini diperdagangkan ke berbagai wilayah kekuasaan Abbasiyah dan negara lain.

Kemajuan di bidang ekonomi tentunya berimbas pada kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Puncak rakyat dialami pada masa Harun Al-Rasyid 786 M-809 M) dan putranya al-Makmun (813 M-833 M). Kejayaan yang melimpah pada masa ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan di berbagai bidang seperti sosial, pendidikan, kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, Kesehatan, Kesusteraan dan Pengadaan Fasilitas-fasilitas Umum. Pada masa inilah berbagai bidang-bidang tadi mencapai puncak keemasannya.

Pertanian

Perkembangan bidang pertanian maju pesat pada awal pemerintahan Dinasty Abbasiyah karena pusat pemerintahan berada di daerah yang sangat subur, di tepian sungai yang terkenal dengan nama Sawad. Pertanian merupakan sumber utama pemasukan negara dan pengolahan tanah hampir sepenuhnya dikerjakan oleh penduduk asli, yang statusnya mengalami peningkatan pada masa rezim baru. Lahan-lahan pertanian yang terlantar, dan desa-desa yang hancur di berbagai wilayah kerajaan diperbaiki dan dibangun secara perlahan-lahan. Mereka membangun saluran irigasi baru sehingga membentuk "jaringan yang sempurna". Tanaman asal Irak terdiri atas gandum, padi, kurma, wijen, kapas, dan rami. Para Khaliah Abbas I sangat menaruh perhatian pada sektor pertanian dan perkebunan. Mereka melakukan studi ilmiah, membangun sekolah-sekolah pertanian yang berdampak sangat luas dalam mencerdaskan kaum Muslimin. Mereka aktif menyelenggarakan penelitian dan studi terhadap berbagai tumbuh-tumbuhan, juga aktif melakukan penelitian tanah untuk wilayah pertanian. Mereka menggunakan berbagai pupuk bagi beragam tanaman.

Industri

Sektor industri juga mendapat perhatian besar dari para Khalifah Abbasi I. Mereka melakukan penambangan perak, tembaga, timah, dan besi di Persia dan Kurasan. Penambangan besi dekat Beirut telah membantu berkembangnya beberapa industri tambang. Sedangkan industri keramik dan batu pualam dibangun di Tibriz, garam dan belerang di Persia Utara, aspal dan minyak bumi di negeri Al-Kurj. Mesir pun pada waktu itu terkenal dengan industri tekstil. Kota tekstil terkenal sebagai pusat industri garmen dan karpet. Baju model Al-Budnah yang dibuat untuk Khalifah harganya

mencapai seribu dinar. Syam terkenal dengan industri kaca dan keramik, dan masih banyak lagi.

Perdagangan

Perhatian para Khalifah Abbasi tidak terbatas hanya pada sektor pertanian dan industri saja. Mereka sangat memperhatikan sektor perdagangan. Sarana dan prasarana perdagangan dibangun. Mereka membuat sumur dan pemberhentian untuk para Kafilah dagang. Mereka membangun mercusuar di perbatasan-perbatasan negara.

Keadaan Daulah Abbasiyah Secara Umum.

Adapun kondisi Daulah Abbasiyah secara umum, adalah sebagai berikut;

Sistem Politik.

Bani Abbas mempunyai pandangan bahwa khilafah merupakan hak mereka sebagai keluarga Rasulullah SAW. Ini merupakan faktor utama yang menjadikan kekuasaan mereka bertahan selama lima abad. Hal itu ditegaskan oleh Abu Ja'far al-Saffah, ketika ia memberikan sambutan setelah menobatkan diri sebagai Khalifah Daulah Abbasiyah yang pertama, bahwa khilafah merupakan hak syar'i bagi keluarga mereka, yang mereka warisi dari Rasulullah SAW.

Secara praktik, Daulah Abbasiyah berdiri di atas pundak bangsa Persia yang sangat membenci Bani Umayyah, karena tidak mendapatkan persamaan hak dengan bangsa Arab. Oleh karena itulah, sistem pemerintahan Bani Abbas mirip dengan kerajaan Persia pada masa pemerintahan Sasan. Sehingga para khalifah Bani Abbas tidak pernah berbicara dengan rakyat kecuali di balik tabir, sebagaimana kebiasaan Kisra Persia. Bahkan mereka memakai baju kerajaan mirip raja Persia dan merayakan hari raya Persia.

Para khalifah pada masa Daulah Bani Abbas memakai 'Sorban Nabi' ketika diangkat menjadi khalifah, dan dalam acara-acara keagamaan. Hal itu untuk memberi isyarat, bahwa mereka mewakili Nabi SAW dalam melindungi umat Islam. Para khalifah Daulah Abbasiyah mendapatkan gelar Imam, untuk menguatkan warna agama dalam kekuasaan mereka.

Bani Abbas memperlakukan musuh politik mereka, dari Bani Umayyah dan Bani Ali dengan kejam. Namun di sebaliknya, Daulah Abbasiyah menjadi pemerintah yang baik bagi rakyatnya. Hal itu dengan mengadakan banyak perbaikan di segala sektor negara. Sebagaimana Bani Abbas berusaha keras untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, sehingga umat Islam mencapai masa keemasannya dari berbagai aspeknya, terutama di bidang keilmuan. Namun pada fase kedua semuanya berubah. Daulah Abbasiyah mulai melemah, seiring dengan melemahnya sistem politik negara, karena mereka sering bergantung kepada kekuatan luar. Pada akhirnya hal itu menyebabkan kehancuran mereka.

Sistem Manajemen

Para Gubernur Daulah Abbasiyah, bukanlah tokoh-tokoh yang menonjol seperti gubernur Daulah Umawiyah. Tugas gubernur daerah hanya sebagai panglima perang dan imam salat. Hal itu terjadi ketika orang-orang kaya mempunyai pengaruh yang kuat terhadap negara. Sebelum masa Khalifah Harun al-Rasyid, khalifah adalah sentral kekuatan negara, sedangkan perdana menteri menjadi tangan kanan raja.

Para khalifah memilih sendiri gubernur-gubernur daerah, namun kekuasaan mereka sangat terbatas. Setiap gubernur yang diberhentikan, ia diharuskan untuk memberikan laporan terperinci tentang wilayah yang dipegangnya. Jika terdapat sedikit saja hal yang meragukan, maka itu menjadi alasan untuk menyita semua harta kekayaannya.

Di semua lembaga yang berada di daerah yang luas, terdapat seorang pegawai yang tugasnya memberikan laporan kepada khalifah tentang kondisi wilayah tersebut secara umum. Bahkan ia menjadi pengawas bagi gubernur di daerah tersebut. Namun pada kelanjutannya, wilayah-wilayah tersebut melepaskan diri dari kekuasaan Daulah Abbasiyah, tanpa mendapatkan konsekuensi apa pun. Sehingga disebutkan dalam sejarah, bahwa tidak ada tersisa bagi khalifah selain Baghdad dan para pegawainya. Tidak ada kekuasaan yang pasti bagi seorang khalifah. Hampir semua wilayah menjadi daerah kekuasaan para gubernur yang melepaskan diri dari Daulah Abbasiyah.

Sistem Peradilan

Pada masa Daulah Abbasiyah, ruh ijtihad mulai melemah seiring munculnya mazhab yang empat. Seorang hakim ketika akan menurunkan vonis harus berpegang dengan salah satu mazhab yang ada. Di Irak dengan mazhab Hanafy, di Syam dan Maroko dengan mazhab Maliki, di Mesir dengan mazhab Imam Syafi'i. Bila dua orang berselisih di luar mazhab yang menjadi pegangan umum di suatu negeri, maka seorang hakim akan memutuskan perkara berdasarkan mazhab orang yang berselisih. atau hakim akan menyerahkan kasus kepada hakim yang semazhab dengan mereka yang berseTERU.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan singkat diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Faktor-faktor yang mendukung berdirinya Daulah Abbasiyah; Daulah Umawiyah mulai jatuh dan hancur, yang memuluskan jalan berdirinya Daulah Abbasiyah. Kemudian terjadi pemberontakan terhadap pemerintahan Umawiyah di semua pelosok Syam, dan terjadi kekacauan di Irak. Di iringi Penduduk Khurasan berhasil memaksakan calon pemimpin mereka untuk memimpin Bani Abbas, yaitu Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad. Maka dibaiat sebagai Khalifah pada hari Jumat 12 Rabiul Akhir 132 H. Sejarah mencatat, bahwa kekuasaannya dimulai sejak terbunuhnya Marwan bin Muhammad, khalifah Bani Umayyah yang terakhir, yaitu pada tanggal 3 Dzulhijjah 132 H. Karena selama khalifah yang lama masih ada, maka khalifah yang baru tidak akan diakui. Muncullah kebangkitan di bidang ilmu dan sastra, yang diiringi kebangkitan kebebasan berpikir dalam penelitian, diskusi dan perdebatan. Hal itu menjadikan Daulah Abbasiyah pada fase ini sebagai simbol kemajuan peradaban Islam. Semua ini karena para khalifah Daulah Abbasiyah fase pertama ini merupakan orang-orang yang visioner.

Daulah Abbasiyah adalah salah satu dinasti kekhalifahan Islam Baghdad, Irak (berlangsung selama empat abad, termasuk masa kemajuan dan kemunduran Bani Abbas), yang menggantikan Dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah dikenal karena perkembangan kebudayaan, seni, ilmu pengetahuan, yang pesat selama masa pemerintahannya. Kondisi Daulah Abbasiyah secara umum sebagai berikut, pertama, sistem Politik Bani Abbas mempunyai pandangan bahwa khilafah merupakan hak mereka sebagai keluarga Rasulullah SAW. Ini merupakan faktor utama yang menjadikan kekuasaan mereka bertahan selama lima abad. Kedua, sistem Manajemen para Gubernur Daulah Abbasiyah bukanlah tokoh-tokoh yang menonjol seperti gubernur Daulah Umawiyah. Tugas gubernur daerah hanya sebagai panglima perang dan imam salat. Ketiga, sistem Peradilan pada masa Daulah Abbasiyah, ruh ijtihad mulai melemah seiring munculnya mazhab yang empat. Maka seorang hakim ketika akan menurunkan vonis harus berpegang dengan salah satu mazhab.

REFERENCES

- Amrullah, M. F. (2019). Sejarah Peradaban Islam; Madrasah Nidzam Al-Mulk. *HUMANISTIKA : Jurnal Keislaman*, 5(1), 41–56. <https://doi.org/10.36835/HUMANISTIKA.V5I1.41>
- Aprianty, S. (2022). Refleksi Awal Terbentuknya Dinasti Abbasiyah. *Tanjak: Sejarah Dan Peradaban Islam*, 2(2), 171–180. <https://doi.org/10.19109/TANJAK.V2I2.12860>
- Hasanah, U., & Verawati, H. (2022). Pendidikan Islam Multikultural : Analisis Historis Masa Dinasti Abbasiyah. *ASANKA : Journal of Social Science and Education*, 3(2), 198–221. <https://doi.org/10.21154/ASANKA.V3I2.4847>
- Ibrahim, A. (2021). Kota Bagdad sebagai Central Peradaban Islam pada Masa Dinasti Abbasiyah. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 3(1), 43–54. <https://doi.org/10.32505/LENERA.V3I1.3083>
- MUID, A. (2019). Perkembangan Islam Dinasti Bani Abbasiyah. *JURNAL ILMU PENGETAHUAN DAN PENDIDIKAN ISLAM*, 3(3). Retrieved from <https://jurnal.maziyatulilmi.com/index.php/jippi/article/view/14>
- mukaromah, ning. (2018). Dinasti Abbasiyah: Metode dan Materi Pendidikan Dasar (Kuttab). *Tarbawi : Jurnal Studi Pendidikan Islami*, 5(01), 5–15. Retrieved from <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/tarbawi/article/view/3093>
- Nuril, F. (2021). Peradaban Islam Masa Dinasti Abbasiyah (Periode Kemunduran). *ISTORIA Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah*, 17(1). <https://doi.org/10.21831/ISTORIA.V17I1.38076>
- Ramdan, D. F., Pendidikan, J. M., Pascasarjana, I., Gunung, S., & Bandung, D. (2023). Kepemimpinan yang Kuat Dalam Manajemen Pendidikan Islam Perspektif Hadis. *Transformasi Manageria: Journal of Islamic Education Management*, 3(2), 248–257. <https://doi.org/10.47467/MANAGERIA.V3I2.3463>
- Rizal, M. C., Saputri, F. I., & Imanda, S. A. R. (2023). Sejarah Pemerintahan Islam: Suatu Tinjauan Singkat. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1), 41–62. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v2i1.212>
- Rusydi, I. (2023). *Tata Kelola Pemerintahan Dalam Islam Sejarah Kepemimpinan Khalifah Hārūn Al-Rashīd (786-809 M) Dan Khalifah Abd Al-Rahmān Al-Nāsir (929-961 M)*. A-Empat.
- Salsabila, R., Sunan, U., & Yogyakarta, K. (2021). Sejarah Dinasti Abbasiyah dan Perkembangan Pendidikan Islam Masa Modern. *ALSYS*, 1(1), 97–112. <https://doi.org/10.58578/ALSYS.V1I1.22>
- Sayono, J. (2021). Langkah-Langkah Heuristik Dalam Metode Sejarah Di Era Digital. *Sejarah Dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, 15(2), 369–376. <https://doi.org/10.17977/UM020V15I22021P369-376>
- Sejarah Kepemimpinan setelah Wafatnya Nabi Muhammad SAW Subhani, A., Raudhah, S., Hadi, S., Ulfa Khaira, M., Islam Negri Sumatera Utara, U., William Iskandar Ps, J. V, ... Utara, S. (2023). Analisis Sejarah Kepemimpinan setelah Wafatnya Nabi Muhammad SAW. *Journal on Education*, 5(3), 9460–9473. <https://doi.org/10.31004/JOE.V5I3.1816>
- Tata Kelola Pemerintahan Dalam Islam Sejarah Kepemimpinan Khalifah Hārūn Al ... - Ibnu Rusydi - Google Buku. (n.d.). Retrieved August 16, 2023, from <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=J0bAEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Daulah+Abbasiyah+kehilangan+efektivitasnya+pada+fase+kedua,+yan>

g+dimulai+pada+tahun+232+H/847+M.+Hal+itu+disebabkan+lemahnya+pemerintahan,+yang+menyebabkan+lemahnya+kekuasaan+pusat+negara+secara+politik,+manajemen+dan+finansial&ots=RnLcpX3OWR&sig=KzWTEF3SHFvD4H3E13Nae3shaMw&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
Walliman, N. (2021). *Research methods: The basics*. Routledge.

Copyright Holder :

© Syofiah Pribadi. Ajid Thohir. Asep Ahmad Hidayat. Danni Nursalim., (2023).

First Publication Right :

© Attractive : Innovative Education Journal

This article is under:

